**ANALISIS TENTANG PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN
NAGARI GALUGUA KECAMATAN KAPUR IX
KABUPATEN LIMAPULUH KOTA**

Oki Ardika Putra¹, Sri Erlinda², Zahirman³

Email: okiardika.putra@yahoo.com¹, linda_sri@yahoo.com², zahirman_thalib@gmail.com³

No. Hp: 085272104222

***Study Program Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Faculty of Teacher Training and Education
Riau University***

Abstract : This research was conducted as motivated by yet progressed to the fullest role Nagari Galugua Consultative Body. In this case as an important instrument Nagari role Consultative Body which duties and functions as a legislative body villages as stipulated in the legislation. Formulation of the problem in this research is how the role of consultative bodies Nagari Galugua District of Kota Kapur IX Limapuluh? and this study aims to determine the role of consultative bodies Nagari Galugua Limapuluh District of Kota Kapur IX. As for the population in this study is villagers' Galugua 1,227 people, while the sample in this study is the caretaker Consultative Body Nagari of 7 people, the government nagari as many as 10 people and society in this case public figures as many as 25 people and the general public as much as 80 people. A sampling technique that uses purposive sampling technique. Data was collected through observation, questionnaires and interviews. In analyzing the data using a combination of methods (Mixed Methods). These results indicate that the role of consultative bodies Nagari Galugua District of Kapur IX Limapuluh based benchmarks by Husaini Usman and Purnomo Setiady Akbar (2011: 146) is the number who answered "very often" and "often" is 48.70% were in the range 26% - 50% or categorized lasted "less good", so that the hypothesis that the role of the District Consultative Body Nagari Galugua Limestone District IX Limapuluhkota good lasts less acceptable.

Keywords: *Role, Nagari Consultative Body (Bamus)*

ANALISISTENTANG PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI GALUGUA KECAMATAN KAPUR IX KABUPATEN LIMAPULUH KOTA

Oki Ardika Putra¹, Sri Erlinda², Zahirman³

Email: okiardika.putra@yahoo.com¹, linda_sri@yahoo.com², zahirman_thalib@gmail.com³

No. Hp: 085272104222

**Study Program Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Faculty of Teacher Training and Education
Riau University**

Abstrak: Penelitian ini dilaksanakan karena dilatarbelakangi oleh belum berjalannya secara maksimal peranan Badan Permusyawaratan Nagari Galugua. Dalam hal ini sebagai instrument penting peranan Badan Permusyawaratan Nagari yaitu tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga legislative nagari sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peranan badan permusyawaratan Nagari Galugua Kecamatan Kapur IX Kabupaten Limapuluh Kota? serta penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan badan permusyawaratan Nagari Galugua Kecamatan Kapur IX Kabupaten Limapuluh Kota. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini yaitu masyarakat Nagari Galugua 1.227 jiwa, sedangkan yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah pengurus Badan Permusyawaratan Nagari sebanyak 7 orang, pemerintah nagari sebanyak 10 orang dan masyarakat dalam hal ini tokoh masyarakat sebanyak 25 orang dan masyarakat umum sebanyak 80 orang. Teknik pengambilan sampel yaitu menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, angket dan wawancara. Dalam menganalisis data menggunakan metode kombinasi (Mixed Methods). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peranan badan permusyawaratan Nagari Galugua Kecamatan Kapur IX Kabupaten Limapuluh berdasarkan tolak ukur menurut Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar (2011: 146) yaitu jumlah yang menjawab “sangat sering” dan “sering” adalah 48,70% berada pada rentang 26% - 50% atau dikategorikan berlangsung “kurang baik”, sehingga hipotesis yang menyatakan peranan Badan Permusyawaratan Nagari Galugua Kecamatan Kapur IX Kabupaten Limapuluh Kota berlangsung kurang baik dapat diterima.

Kata kunci: Peranan, Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus)

PENDAHULUAN

Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus) bukan merupakan lembaga pertama yang berperan sebagai lembaga penyalur aspirasi masyarakat nagari melainkan perbaikan dari lembaga sejenis yang pernah ada sebelumnya yaitu Badan Musyawarah Nagari yang kemudian direvisi setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diubah menjadi Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus). Konsepsi Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus) sebagaimana yang diinginkan oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 adalah untuk memberikan fungsi kontrol yang kuat kepada Pemerintah Nagari (Wali Nagari beserta aparatur). Selain itu, dikenalkannya Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus) adalah untuk memperkenalkan adanya lembaga legislatif, dan mempunyai kewenangan-kewenangan legislasi pada umumnya di nagari.

Untuk menjalankan wewenangnya tersebut maka dalam Peraturan Daerah Kabupaten Limapuluh Kota No. 02 Tahun 2013 telah diatur mengenai fungsi Badan Permusyawaratan Nagari tersebut yaitu menetapkan Peraturan Nagari bersama Wali Nagari, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari. Di samping itu dalam Peraturan Bupati Kabupaten Limapuluh Kota No. 35 Tahun 2013 pada BAB IV pasal 19 di tegaskan juga selain memiliki fungsi-fungsi di atas Bamus memiliki wewenang dalam bentuk Legislasi yang diwujudkan dalam membentuk Peraturan Nagari bersama Wali Nagari dan fungsi anggaran yang diwujudkan dalam menyusun dan menetapkan APB-Nagari bersama Wali Nagari.

Berkaca dari aturan yang ada di atas sudah demikian jelas kiranya seperti apa peran yang diamanatkan oleh undang-undang teruntuk Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus) sendiri, namun dengan kewajiban yang diamanatkan tersebut sejatinya sudah mampukah Bamus untuk merealisasikannya? apakah benar-benar membantu Pemerintah Nagari dalam penyelenggaraan pemerintahan atau hanya menjadi simbol demokrasi tanpa implementasi, atau malah menimbulkan masalah yang tidak perlu, yang hanya akan menghabiskan energi yang sesungguhnya lebih dibutuhkan oleh masyarakat nagari untuk melepaskan diri dari jerat kemiskinan dan krisis ekonomi.

Berdasarkan prasarvey dilapangan, peneliti menjumpai kurang optimalnya peran Bamus sendiri di Nagari Galugua, hal ini dapat dilihat karena terjadinya terjadinya kefakuman (tidak berfungsinya) dari Bamus yaitu mengajukan Ramcangan Peraturan Nagari dan bisa di dilihat dari setiap peraturan yang ada di nagari itu hanya berasal dari institusi adat setempat dan dari pihak pemerintah nagari saja. Selain itu Bamus juga jarang tidak menghadiri rapat, hal ini dapat dilihat dengan ketidakhadiran Bamus ketika ada rapat tanpa adanya alasan. Dan bahkan peneliti juga mendapatkan informasi bahwa sering terjadinya ketidaksepahaman antara kedua lembaga tersebut, yang mana seharusnya kedua belah pihak ini merupakan mitra kerja dalam menjalankan roda pemerintahan nagari. Rumusan Masalah dalam penelitian ini merumuskan masalah sebagai berikut : Bagaimana Peranan Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus) di Nagari Galugua Kecamatan Kapur IX Kabupaten Limapuluh Kota ?". Dan tujuan penelitian ini adalah: "Untuk mengetahui Peranan Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus) di Nagari Galugua Kecamatan Kapur IX Kabupaten Limapuluh Kota".

METODE PENELITIAN

Tempat penelitian ini dilaksanakan di Nagari Galugua Kecamatan Kapur IX Kabupaten Limapuluh Kota, dengan waktu terhitung dari bulan Juli sampai bulan Oktober 2015. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparatur Pemerintah Nagari Galugua, anggota Badan Permusyawaratan Nagari, Pemuka Adat dan masyarakat nagari Galugua yang semuanya berjumlah 1.227 jiwa. dalam menentukan sampel peneliti mengacu pada pendapat **Suharsimi Arikunto (2002:24)** yang menyatakan apabila subjek kurang dari 100 orang, maka lebih baik diambil semua sehingga penelitian merupakan penelitian populasi. Apabila subjek lebih dari 100 orang, maka dapat diambil 10-15% atau 20-25%. Teknik pengambilan sampel ini menggunakan teknik *purposive sampling* maka peneliti mengambil sampel sebanyak 10%, yaitu 122

orang dengan rincian Perangkat Nagari Galugua sebanyak 10 orang, Pengurus Badan Permusyawaratan Nagari Galugua 7 orang, Pemuka Masyarakat sebanyak 25 orang dan Masyarakat sebanyak 80 orang.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, angket dan wawancara. Angket dan wawancara digunakan untuk memperoleh data dan informasi sikap responden terhadap peran Badan Permusyawaratan Nagari Galugua, Kecamatan Kapur IX Kabupaten Limapuluh Kota.

Teknik Analisa Data

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dalam menganalisis data menggunakan rumus sebagai berikut

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

P = Besar alternatif jawaban

F = Frekuensi alternatif

N = Jumlah sampel penelitian (Anas Sudjana, 2001:40)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk melihat data hasil penelitian secara umum dapat dilihat pada table berikut ini :

1. Fungsi Legislasi

Sebagai lembaga Legislatif di tingkat nagari BAMUS berfungsi membentuk Peraturan Nagari bersama Wali Nagari (Legislasi) sesuai dengan yang telah diamanatkan Perda Kabupaten Limapuluh Kota No. 02 Tahun 2013 dan juga diperkuat oleh Peraturan Bupati No. 35 Tahun 2013. Yang menjadi subindikator peneliti dalam hal ini adalah peran Bamus dimulai dari Merumuskan Rancangan Peraturan Nagari (RANPERNA), Membahas RANPERNA, Menetapkan Peraturan Nagari (PERNA), dan mensosialisasikan PERNA yang telah ditetapkan bersama Wali Nagari. Untuk melihat lebih jelasnya bagaimana peran BAMUS dalam hal menjalankan fungsi Legislasinya di Nagari Galugua, maka dapat dilihat melalui table berikut berikut:

Tabel 1.1 Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Peran Bamus Nagari Galugua Dalam Menjalankan Fungsi Legislasi

No	Daftar Pernyataan	Alternatif jawaban							
		SS		S		KK		TP	
		F	%	F	%	F	%	F	%
1	Merumuskan Peraturan Nagari	0	0	12	9,83	42	34,42	68	55,73
2	Membahas Peraturan Nagari	1	0,81	7	5,74	69	56,56	43	35,25
3	Menetapkan Peraturan Nagari	22	18,03	63	51,63	7	5,74	30	24,59
4	Mensosialisasikan Peraturan Nagari	2	1,63	32	26,22	61	50,00	6	4,91

Jumlah	25	20,47	114	93,42	179	146,72	147	120,48
Rata-rata	6,25	5,11	28,5	23,35	44,75	36,68	36,755	30,12

Sumber: Data Olahan Tahun 2015

Berdasarkan table diatas dapat diketahui bahwa peranan Badan Permusyawaratan Nagari Galugua dalam menjalankan fungsi legislasinya ialah berada pada kategori “sangat sering” sebesar 5,11%, berada pada kategori “sering” sebesar 23,35%, berada pada kategori “kadang-kadang” sebesar 36,68% dan berada pada kategori “tidak pernah” sebesar 30,12%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa peran BAMUS dalam menjalankan fungsi legislasi berada pada kategori “Kurang Baik”.

2. Fungsi Anggaran

Di dalam Peraturan Bupati Kabupaten Limapuluh Kota No. 35 tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Nagari pada BAB IV pasal 19 yang menjelaskan bahwa BAMUS mempunyai fungsi legislasi yang diwujudkan dalam membentuk Peraturan Nagari bersama Wali Nagari (ayat 1), selain itu juga pada ayat 2 mengatakan bahwa BAMUS memiliki fungsi anggaran yang diwujudkan dalam menyusun dan menetapkan APB Nagari bersama Wali Nagari. Untuk melihat lebih jelasnya bagaimana peran BAMUS dalam hal menjalankan fungsi anggarannya di Nagari Galugua, maka peneliti akan uraikan sebagai berikut:

Tabel 1.2 Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Peran BAMUS Nagari Galugua Dalam Menjalankan Fungsi Anggaran

No	Daftar Pernyataan	Alternatif jawaban							
		SS		S		KK		TP	
		F	%	F	%	F	%	F	%
1	Menyusun Rancangan APB-Nagari Bersam Wali Nagari	3	2,45	12	9,83	79	64,75	28	22,95
2	Menetapkan APB-Nagari Bersama Wali Nagari	7	5,73	59	48,36	52	42,63	4	3,27
	Jumlah	10	8,18	71	58,19	131	107,3	32	26,22
	Rata-rata	5	4,9	35,5	29,09	65,5	53,69	16	13,11

Sumber: Data Olahan Tahun 2015

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa responden memberikan tanggapan terhadap peran Badan Permusyawaratan Nagari Galugua Dalam Menjalankan Fungsi Anggaran berada pada kategori “sangat sering” sebesar 4,9%, berada pada kategori “sering” sebesar 29,09%, berada pada kategori “kadang-kadang” sebesar 53,69% dan berada pada kategori “tidak pernah” sebesar 13,11%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa peran BAMUS dalam hal menjalankan fungsi anggaran adalah berada pada kategori “kurang baik” hal ini dapat dilihat dari responden yang menyatakan “sangat sering” dan “sering” hanya 33,99%.

3. Fungsi Pengawasan

Dalam setiap organisasi, terutama dalam organisasi pemerintahan, fungsi pengawasan sangatlah penting, karena pengawasan itu adalah suatu usaha untuk menjamin adanya keserasian antara penyelenggaraan tugas pemerintahan oleh aparatur pemerintahan dan menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna. Selain itu dengan adanya fungsi pengawasan yang dimiliki Bamus ini diharapkan juga terciptanya *chek and balance* di tingkat pemerinthan nagari. Di dalam Perda Kab. Limapuluh Kota No. 02 Tahun 2013 dijelaskan juga bahwasanya selain fungsi legislasi dan anggaran yang dimiliki, Bamus juga berwenang mengawasi penyelenggaraan pemerintahan yang diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan nagari, peraturan wali, keputusan wali nagari, dan juga kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintaha nagari.

Tabel 1.3 Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Peran BAMUS Dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan Pada Pemerintah Nagari Galugua

No	Daftar Pernyataan	Alternatif jawaban							
		SS		S		KK		TP	
		F	%	F	%	F	%	F	%
1	Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan nagari & Peraturan Wali Nagari	32	26,22	74	60,65	9	7,37	7	5,73
2	Pengawasan terhadap kebijakan dan keputusan wali nagari.	7	5,73	82	67,21	17	13,93	16	13,11
3	Pengawasan terhadap penggunaan APB-Nagari	20	16,34	51	41,80	49	40,16	2	1,63
4	Pengawasan terhadap pertanggungjawaban APB-Nagari	1	0,81	36	29,50	85	69,67	0	0
	Jumlah	60	49,51	243	199,16	160	131,13	25	20,47
	Rata-rata	15	12,27	60,7	49,79	40	32,78	6,25	5,11

Sumber: Data Olahan Tahun 2015

Berdasarkan tabel 4.24 diatas dapat diketahui bahwa responden memberikan tanggapan terhadap peran Badan Permusyawaratan Nagari Galugua Dalam Menjalankan Fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan nagari galugua berada pada kategori “sangat sering” sebesar 12,27%, berada pada kategori “sering” sebesar 49,79%, berada pada kategori “kadang-kadang” sebesar 32,78% dan berada pada kategori “tidak pernah” sebesar 5,11%.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peran BAMUS dalam hal menjalankan fungsi pengawasan adalah berada pada kategori “ Baik”, karena dari total semua responden terdapat 62,06% yang menyatakan “sangat sering” dan “sering”.

4. Mendukung Kelestarian Adat Istiadat

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Limapuluh Kota No. 02 Tahun 2013 selain memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan pengawasan, Badan Permusyawaratan nagari juga diamanahkan untuk bisa mendukung kelestarian adat-istiadat di nagari. Hal ini juga dikuatkan dengan filosofi dan kebudayaan minangkabau yang mengatakan bahwa adat istiadat minangkabau tidak bisa dipisahkan baik itu dengan tata pemerintahan maupun dalam kehidupan masyarakat nagari galugua. Artinya adat istiadat adalah hal yang menjadi kabiasaan mayarakat nagari minangkabau yang telah diturunkan oleh nenek moyang minangkabau.

Tabel 1.4 Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Peran BAMUS Dalam Mendukung Kelestarian Adat Istiadat di Kenagarian Galugua

No	Daftar Pernyataan	Alternatif jawaban							
		SS		S		KK		TP	
		F	%	F	%	F	%	F	%
1	Mensosialisasi kanadat istiadat	28	22,95	73	59,83	18	14,75	3	2,45
2	Menjaga adat istiadat	31	25,40	70	57,37	20	16,39	1	0,81
3	Melestarikan adat istiadat	19	15,57	58	47,54	33	27,04	12	9,84
	Jumlah	78	63,92	201	164,74	71	58,18	16	13,1

Rata-rata	26	21,30	67	54,91	23,6	19,39	5,33	4,36
					6			

Sumber: Data Olahan Tahun 2015

Berdasarkan tabel 4.28 diatas dapat diketahui bahwa responden memberikan tanggapan terhadap peran Badan Permusyawaratan Nagari Galugua Dalam mendukung kelestarian adat isitiadat di kenagarian galugua yaitu “sangat sering” sebesar 21,30%, berada pada kategori “sering” sebesar 54,91%, pada kategori “kadang-kadang” sebesar 19,39% dan pada kategori “tidak pernah” sebesar 4,36%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peran BAMUS dalam hal mendukung kelestarian adat istiadat di kenagarian galugua berada pada kategori “Sangat Baik”. Hal ini dapat dilihat karena sebanyak 76,21% responden menyatakan “sangat sering” dan “sering”.

5. Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat

Tabel 1.5 Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Peran BAMUS Dalam Hal Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat

No	Daftar Pernyataan	Alternatif jawaban							
		SS		S		KK		TP	
		F	%	F	%	F	%	F	%
1	Menerima Aspirasi Maysarakat	8	6,55	23	18,85	66	54,09	25	20,49
2	Menyalurkan Aspirasi Masyarakat	6	4,91	37	30,32	69	56,55	10	31,91
3	Menginformasik an Aspirasi Masyarakat	5	4,09	70	57,37	44	36,06	3	2,45
	Jumlah	19	15,55	130	106,54	179	146,7	38	54,85
	Rata-rata	6,33	5,18	43,3	35,51	59,66	48,9	12,6	18,28
				3				6	

Sumber: Data Olahan Tahun 2015

Berdasarkan tabel 4.33 diatas dapat diketahui bahwa responden memberikan tanggapan terhadap peran Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus) Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat di kenagarian galugua yaitu “sangat sering” sebesar 5,18%, berada pada kategori “sering” sebesar 35,51%, berada pada kategori “kadang-kadang” sebesar 48,9% dan berada pada kategori “tidak pernah” sebesar 18,28%.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peran BAMUS dalam hal Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat di kenagarian galugua adalah berlangsung kurang baik karena dari total keseluruhan responden hanya 48,51% responden yang menyatakan “sangat sering” dan “sering”.

Tabel 1.6 Rekapitulasi Akhir Data Tentang Peranan Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus) di Nagari Galugua Kec. Kapur IX Kab. Limapuluh Kota

No	Indikator Pertanyaan		Alternatif Jawaban							
			SS		S		KK		TP	
			F	%	F	%	F	%	F	%
1	Merumuskan	Peraturan Nagari	0	0	12	9,83	42	34,42	68	55,73
2	Membahas	Peraturan Nagari	1	0,81	7	5,74	69	56,56	43	35,25
3	Menetapkan	Peraturan Nagari	22	18,03	63	51,63	7	5,74	30	24,59
4	Mensosialisasikan	Peraturan Nagari	2	1,63	32	26,22	61	50,00	6	4,91

5	Menyusun Rancangan APB-Nagari Bersam Wali Nagari	3	2,45	12	9,83	79	64,75	28	22,95
6	Menetapkan APB-Nagari Bersama Wali Nagari	7	5,73	59	48,36	52	42,63	4	3,27
7	Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan nagari & Peraturan Wali Nagari	32	26,22	74	60,65	9	7,37	7	5,73
8	Pengawasan terhadap Keputusan dan kebijakan Wali Nagari	7	5,73	82	67,21	17	13,93	16	13,11
9	Pengawasan terhadap penggunaan APB-Nagari	20	16,39	51	41,80	49	40,16	2	1,63
10	Pengawasan terhadap pertanggungjawaban APB-Nagari	1	0,81	36	29,50	85	69,67	0	0
11	Mensosialisasikan adat istiadat	28	22,95	73	59,83	18	14,75	3	2,45
12	Menjaga adat istiadat	31	25,40	70	57,37	20	16,39	1	0,81
13	Melestarika Adat Isitiadat	19	15,57	58	47,54	33	27,04	12	9,83
14	Menerima Aspirasi Maysarakat	8	6,55	23	18,85	66	54,09	25	20,49
15	Menyalurkan Aspirasi Masyarakat	6	4,91	37	30,32	69	56,55	10	31,91
16	Menginformasikan Aspirasi Masyarakat	5	4,09	70	57,37	44	36,06	3	2,45
	Jumlah	192	157,27	759	622,05	720	590,11	258	235,11
	Rata-Rata	12	9,83	47,43	38,87	45,00	36,88	16,12	14,69

Sumber: Data Olahan Tahun 2015

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa Peranan Badan Permusyawaratan Nagari Galugua Kec. Kapur IX dilihat dari pelaksanaan tugas dan fungsinya (Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran, Fungsi Pengawasan, Mendukung Kelestarian Adat Istiadat dan Menampung & Menyalurkan Aspirasi Masyarakat) berada pada kategori “sangat sering” 9,83%, berada pada kategori “sering” sebesar 38,87%, berada pada kategori “kadang-kadang” sebesar 36,77% dan berada pada kategori “tidak pernah” sebesar 14,69%. Dengan demikian peranan Badan Permusyawaratan Nagari Galugua dilihat berdasarkan tolak ukur pada BAB III menurut **Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar (2011:146)** yaitu jumlah yang menjawab “sangat sering dan sering yaitu 48,70% berada pada rentang 26% -50% atau berjalan “kurang baik”.

Jadi dapat disimpulkan bahwa peranan badan permusyawaratan nagari galugua jika dilihat dari pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai lembaga legislatif nagari dalam pemerintahan dan pembangunan nagari berlangsung kurang baik.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Simpulan

Berdasarkan analisa dan pembahasan mengenai pelaksanaan peran badan permusyawaratan nagari (bamus) di Nagari Galugua Kecamatan Kapur IX Kabupaten Limapuluh Kota, maka dapat peneliti simpulkan bahwa peran badan permusyawaratan Nagari Galugua Kecamatan kapur IX Kabupaten Limapuluh Kota jika dilihat berdasarkan tolak ukur menurut Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar (2011:146) yaitu jumlah yang menjawab “sangat sering” dan “sering” adalah 48.11% berada pada rentang 26% - 50% atau dikategorikan berjalan “kurang baik”, sehingga hipotesis yang menyatakan peranan Badan Permasyarakatan Nagari Galugua Kecamatan Kapur IX Kabupaten Limapuluh Kota berlangsung kurang baik dapat diterima.

B. Rekomendasi

Sebagai lembaga legislatif ditngkat pemerintahan nagari, Badan Permasyarakatan Nagari (Bamus) sudah seharusnya menjadi suatu institusi yang bisa mengedepankan prinsip demokrasi dalam menjalan kewajibannya, dan hendaknya bisa mengedepankan kepentingan-kepentingan masyarakat sebagaimana yang telah diamanatkan oleh undang-undang. Untuk itu beberapa rekomendasi yang dapat peneliti sampaikan terhadap hasil peneltian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Nagari sebagai lembaga eksekutif sekaligus pimpinan penyelenggaraan pemerintahan nagari seharusnya turut mendukung dan membantu sepenuhnya apa-apa saja yang menjadi penunjang kemajuan Bamus Nagari.
2. Badan Permasyarakatan Nagari (Bamus) sebagai lembaga legislatif di tingkat Pemerintahan Nagari seharusnya lebih responsive terhadap aspirasi-aspirasi masyarakat nagari.
3. Dalam menjalankan tugas dan fungsi, sudah seharusnya Badan Permasyarakatan Nagari (Bamus) bisa memberikan *controlling* terhadap pemerintah agar terciptanya *check and balance* di tingkat pemerintahan nagari
4. Sebagai negara demokrasi, masyarakat nagari merupakan unsure yang terpenting di dalamnya, oleh karena itu diharapkan menghapus paradigam apatisnya terhadap pemerintahan menjadi masyarakat yang partisipatif.
5. Sementara itu dari sisi masyarakat, poin penting yang seharusnya dirasakan di dalam era otonomi daerah adalah semakin transparannya pengelolaan Pemerintah Nagari dan semakin pendeknya rantai birokrasi, dimana hal tersebut secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh positif terhadap jalannya pembangunan nagari.

UCAPAN TERIMAKASIH

Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada, yang terhormat:

1. Dr. H.M. Nur Mustafa, M.Pd, selaku dekan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau yang telah memberikan izin untuk melaksanakan penelitian ini.
2. Sri Erlinda, S.IP, M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Pendidikan Sosial pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau yang sudah memberikan kesempatan untuk mengikuti program pendidikan yang ada, srta sekaligus pembimbing I penulis yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan serta meluangkan waktu dan tempat bagi penulis demi kesempurnaan skripsi ini.
3. Drs. Zahirman, M.H selaku Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Serta

sekaligus pembimbing II penulis yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan serta meluangkan waktu dan tempat bagi penulis demi kesempurnaan skripsi ini.

4. Dosen Program Studi Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau yang telah mengajar dan memberikan bekal berbagai ilmu pengetahuan selama proses pendidikan berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

Aly, Fachri. 2003, "*Penjelasan Budaya*" Nilai Demokrasi Minangkabau: Peringatan 100 Tahun Bung Hatta dalam Jurnal Demokrasi dan HAM Problem Demokratisasi di Indonesia dalam Perspektif Budaya, Habibie Center:Jakarta

Anwar, Chairul. 1997 *Hukum Adat Indonesia; Meninjau Hukum Adat Minangkabau*.Rineka Cipta: Jakarta:

Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian (Suatu pendekatan praktek edisi revisi V)*.Rineka Cipta: Jakarta

Azra, Azyumardi. 2003. *Pendidikan Kewargaan*. Tim ICCE UIN:Jakarta

Chalid, Pheni, 2005. *Otonomi Daerah, Masalah, Pemberdayaan, Dan Konflik*. Kemitraan: Jakarta

Dobbin, Christine, 2008. *Gejolak Ekonomi, Kebangkitan Islam, dan Gerakan Padri Minangkabau 1784-1847*, diterjemahkan oleh Lilian D.Tedjasudhana, Komunitas Bambu: Depok

Departemen Pendidikan Nasional.2008.*Kamus Besar Bahasa Indonesia EdisiKetiga*.Balai Pustaka: Jakarta

Eddison, Ahmad. 2007. *Metodologi Penelitian*. Cendikia Insani: Pekanbaru

Franz & V.B. Keebet. 2007. *Identitas-identitas Ambivalen Desentralisasi dan Komunitas -Komunitas Politik Minangkabau*. Dalam Scchulte Henk & Gerry (Eds). *Politik Lokal di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Ibrahim Dt. Sanggono Diradjo, 2009. *Tambo Alam Minangkabau; Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang*, Kristal Multi Media: Bukittinggi

Kansil, C.S.T, 2001. *Pemerintah Daerah Di Indonesia*. Sinar Grafika: Jakarta

Kemal Iskandar, 2008. *Pemerintahan Nagari Minangkabau & Perkembangannya*. Graha Ilmu: Jakarta

Maryati, Kun, 2007. *Sosiologi* .PT Gelora Aksara Pratama: Jakarta

- MS, Amir, 2006. *Adat Minangkabau, Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*, Mutiara Sumber Widya: Jakarta
- Rivai Velthzai, 2004. *Kepemimpinan*. Grafindo: Jakarta
- Santosa, Budi.2003. *Desa Dan Pemerintahannya*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Soekanto, Soejono.1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. CV Rajawali: Jakarta
- Sudjana, Anas. 2001. *Pengantar Statistik Pendidikan*. Bumi Aksara : Jakarta
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. ALFABETA: Bandung
- , 2013. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Alfabeta: Bandung
- Surianingrat, Bayu, 1992. *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*, Rineka Cipta: Jakarta
- Susanto S. Astrid. 1985. *Pengantar Sosiologi Pembangunan Sosial*. Bina Cipta: Jakarta
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. 2011. *Metodologi Penelitian Sosial*. Bumi Aksara: Jakarta
- Widjaja, HAW. 2004. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan utuh*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta
- , 2007. *Otonomi Daerah* . PT. Raja Grafindo persada: Jakarta
- Winarno. 2007. *Paradigmabarur Pendidikan Kewarganegaraan*. Bumi Aksara: Jakarta
- Sumber Lain :
- Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Sekretariat Jenderal MPR RI. 2012: Jakarta
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 *Tentang Pemerintahan Daerah*
- Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014*tentang Desa*
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 02 Tahun 2007 *Tentang Sistem Pemerintahan Nagari*.
- Peraturan Daerah Kabupaten Limapuluh Kota Nomor 01 Tahun 2001 *Tentang Sistem Pemerintahan Nagari*.

Peraturan Daerah Kabupaten Limapuluh Kota Nomor 02 Tahun 2013 *Tentang Sistem Pemerintahan Nagari.*

Peraturan Bupati 50 Kota No. 35 tahun 2013 *Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Nagari*